

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *jurnal hokum & pembangunan*, 50(1), 91-105.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakar
- Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar *Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki.2005. *Penelitian Hukum surabaya: kencana prenada media group*..
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya*.Bogor: Politeia
- Johnny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Dewa Gede, Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- C.T. Simorangkir, S.H, Drs. Rudy T. Erwin, S.H., J.T. Prasetyo, S.H., 2013 *Cetakan kelima belas, Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si,2019, *Cetakan ke-10, Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Roni Wiyanto, S.H.,M.H, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Adami Chasawi, Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Malang

Dr. Joenadi Efendi, S.H.I.,2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Cetakan 1, Prenadamedia Group, JL. Kabayunan No.1 Tapos-Cimanggis,Depok.

Hehanusa Maya, 2020, Hukum Pidana, kupang

Andrisman Tri. 2007, Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung

Sunggono Bambang,2012. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

**Sumber Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  
Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Atau Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik